

Notulensi Rapat Jurusan Ilmu Politik tanggal 2 Novermber 2020 (Via Online)

Peserta hadir ;

1. Dr. Bakaruddin Rosyidi, MS
2. Drs. Tamrin, M.SI
3. Dr. Indah Adi Putri, M.IP
4. Dr. Asrinaldi, M.Si
5. Dr. Tengku Rika Valentina, MA
6. Dewi Anggraini, S.IP., M.Si

7. Dr. Aidinil Zetra, MA

8. Mhd. Fajri, S.IP., M.A.

Peserta izin ;

1. Andri Rusta, S.IP., M.PP (TB)
1. Sadri, S.IP., M.Soc.Sc (TB)
2. Zulfadli, S.HI., M.Si (TB)
3. Irawati, S,IP., MA (TB)
4. Drs. Syaiful, M.Si
5. Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.Sc (TB)

Agenda ;

1. Pembahasan Kurikulum KKNI dan Merdeka Belajar
2. Penetapan dosen pengampu mata kuliah semester genap 2020\
3. Dll yang dirasa perlu

Proses sidang ;

Nama	Pandangan peserta rapat
Dr Indah	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembukaan▪ Bapak ibu. Hari ini kita ,elaksanakan rapat jurusan, rapat ini dipercepat, karena ada tawaran mata kuliah semester genap. Kita juga akan membahas mengenai mata kuliah wajib universitas, yang pada rapat sebelumnya kita hilangkan yaitu kewarganegaraan, karena pada waktu itu akan dimasukan kedalam kurikulum mata kuliah wajib di fakultas, konsekuensinya adalah kita akan mengurangi mata kuliah pilihan jurusan kita▪ Kita juga akan membahas mengenai cpl mata kuliah kita juga dan seterusnya bidang kajian mata kuliah kia, mudahan bisa diselesaikan sebelum jam 12 ini▪ Kita masuk pada agenda petama, yaitu mengenai mata kuliah Kewarganegaraan yang pada pertemuan sebelumnya kita hilangkan, kemungkinan kita akan masukan pada semester 4 dan 6
Rika	<ul style="list-style-type: none">▪ Untuk mata kuliah fakultas bagaimana kalau kita geser
Indah	<ul style="list-style-type: none">▪ Pada waktu rapat pimpinan kmarean memang hanya baru 2 jurusan yang sudah melakukan nya yaitu, ipol dan AP▪ Nanti kita akan meminta ketegasan kepada wd 1 untuk menekankan

	bahwa memang mata kuliah wajib fakultas itu wajib diterapkan ke semua jurusan
Al	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kita harus hilangkan, bukan hanya digeser. Karena konsekuensinya ada penambahan sks, dari 146 SKS menjadi 149 SKS. Bagaimana kalau mata kuliah wajib yang belum pernah kita ajarkan itu yang kita ganti, biar sks nya masih 146 sks. Karena kalau masih ada penambahan sks maka angka koefisien prodi bertambah dan juga berpengaruh pada akreditasi juga. Jadi mata kuliah yang sama kita hilangkan, tentu kita identifikasi juga
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iya, jumlah sks akan bertambah dr 146 menjadi 149 Sks. Bagaimana kalau mata kuliah pilihan yang kita kurangi
Al	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ini pasti akan berpengaruh ke akreditasi, bukan hanya sekedar menghilangkan saja, kita hilangkan apa tidak berpengaruh pada akreditasi juga
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kalau wajib kita hilangkan, maka semester 2 kita hilangkan
Al	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak hanya dihilangkan saja, trus ditempel. Makanya perlu ada kajian yang mendalam untuk itu, kita lihat dulu RPS mata kuliah nya, mana yang hampir mirip, itu yang harus kita hilangkan dan kaji. Sy lebih cenderung ganti mata kuliah yang wajib yang mirip kita hilangkan, kemudian baru kita ganti dg kewarganegaraan
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada yang lainnya
Tamrin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teori dengan pemilikan itu hampir sama, kita ambil saja salah satu
Al	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dulu waktu menyusun mata kuliah, pancasila dan kewarganegaraan itu digabung, tapi tidak tau pula kenapa di pisah
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saya lebih cenderung dihilangkan satu mata kuliah dibandingkan dengan menambah sks mahasiswa. Ini mata kuliah semester 4
Al	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sy lebih cenderung mata kuliah teori perbandingan politik yang dihilangkan, karena ini dasarnya karena kita ada kosentrasi, sekarang kita tidak berbasis kosentrasi lagi
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ya, sy lebih cenderung ke mata kuliah teori perbandingan juga, akan sama juga dengan teori politik juga. Yang ngajar dulu pak tamrin dan b sri. Dulu RPS nya sama kah dengan RPS teori politik
Tamrin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebenarnya ada perbedaan, kalau teori lebih normatif sementara teori perbandingan itu lebih empirik atau lebih pada perspektif
Al	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada beberapa negara dan mazhab, memang kita lihat bahwa yang teori perbandingan politik itu masuk pada kajian teori politik
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jadi memang mata kuliah ini hampir sama dengan teori politik, nanti semester depan pak tamrin yang dijadikan sebagai pengampunya. Bagaimana bapak/ibk?
Rika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setuju saja
Aidinil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sy setuju saja dengan apa yang telah disepakati bersama. Apakah kita akan tetap melaksanakan kurikulum yang belum ada SK Rektornya atau kita jalankan saja seperti yang sudah ada
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setelah kita sepakati dengan mata kuliah kewarganegaraan, maka langkah selanjutnya kita akan menetapkan nama-nama dosen pengampu mata kuliah semester genap. Insyallah Desember 2020 kita sudah kirimkan surat untuk pengesahan kurikulum ke rektor
Aidinil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Artinya sebelum kita sahkan, sudah berlaku artinya ya
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ya sudah berlaku pak, untuk 3 angkatan
Aidinil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kita harus pastikan, bisa kontak pak Asrul untuk mendiskusikan apakah

	tidak bermasalah pada dikti. Kalau tidak masalah maka kita akan lanjutkan kurikulum kita ini, kalau akan bermasalah di Dikti, maka kita akan lakukan kurikulum yang ada saja dulu
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sy kan dapat warisan dr Kajur sebelumnya, bahwa kurikulum ipol dirubah tahun 2018, sebelum masuk kurikulum ini sudah berlaku juga
Al	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurikulum ini kan dicombine pada tahun 2019, kita sudah kirim ke senat, senat ke fakultas, fakultas ke rektor. Tapi diperjalanan ada pergantian mata kuliah dan sudah disetujui oleh senat. Tapi sy tidak atau bagaimana perjalan selanjutnya
Dewi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebenarnya sudah diajukan surat pengantar kepada dekan untuk mensahkan kurikulum, akan tetapi sempat terhenti karena ada program merdeka belajar, makanya di pending dulu sampai ada penegasan mata kuliah merdeka belajar
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ya, setelah ini kita akan kirim ke fakultas dokumen kurikulum kita ini, mudahan dalam waktu dekat akan keluar SK rektornya
Ai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Artinya kita tunggu dulu kurikulum program merdeka belajar?
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara substansi tidak akan merubah nama mata kuliah, karena itu kesepakatan saat FGD kmaren. Sy share lagi mata kuliah yang kita usulkan untuk program merdeka belajar di desa
Ai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kenaoa program merdeka belajar di desa implementasinya melalui mata kuliah?
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ini disepakati bersama, bahwa mata kuliah ini akan didampingi oleh dosen dari ipol, ada 4 mata kuliah yang di dikirimkan ke wd 1, yaitu : Pembangunan partisipatif, Pembangunan Partisipatif, Politik Pemerintahan Desa/Nagari, Politik Perkotaan dan Pedesaan. Semua mahasiswa akan berkonsultasi dengan para dosen pengampu mata kuliah yang telah ditetapkan. Sifatnya tidak wajib, mahasiwa bisa saja tidak mengambil program merdeka belajar di desa
Ai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Artinya tidak wajib mahasiwa mengambilnya, misalnya hanya 1 mata kuliah, artinya mereka hanya mengambil 3 SKS, sementara dalam 1 semester itu ada 24 SKS
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisa diambil 24 SKS pak
Ai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana mereka mengambil, sementara mereka berada di desa?artinya kita harus ada kebijakan bahwa mahasiswa ini bisa mengambil paling tidak 7-8 mata kuliah di desa atau bisa jadi mahasiswa menambah mata kuliah untuk dikonversi disemester lain. Termasuk magang, misal magang di DPR, nah jurusan harus menyediakan mata kuliah untuk itu
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak jauh berbeda pemahaman kita pak, pada inti nya program merdeka belajar itu adalah menambah soft skill mhs dan berada pada semester lanjut sehingga tdk mengganggu proses perkuliahan untuk mata kuliah wajib. Kita akan konversi ke dalam mata kuliah yang ada atau cukup kita jadikan pilihan kepada mahasiswa sebagai pilihan saja, jadi memang tidak ada kewajiban kepada mahasiwa
Al	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kita sepakati saja di jurusan, kita akan konversi atau gimana?ini juga tidak tegas juga
Ai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kita harus siapkan 24 SKS mata kuliah. Kapan kita akan lakukan, ini perlu juga disepakati
Rika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kita minta Pak Ai untuk menerangkan 8 metode Program merdeka belajar itu

Indah	<ul style="list-style-type: none"> Tidak apa2, kita persilahkan pak Ai untuk menerangkan
Ai	<ul style="list-style-type: none"> Sy dalam posisi tidak pas untuk menerangkan, sudah berbulan-bulan tidak lagi memikirkan yang ini
Indah	<ul style="list-style-type: none"> Kita minta jugalah sama pak Ai
Ai	<ul style="list-style-type: none"> Ini baru draf, sy dulu sudah siapkan kalau ada sk rektor, ada 8 program merdeka belajar, yaitu : pertukaran pelajar, magang. Magang ini peru kita bicarakan secara lebih mendalam, banyak mahasiswa yang lebih siap dalam menghadapi lapangan pekerjaan, ada konversi mata kuliah ini. Kemudian asisten mengajar, proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, perlu ada konversi mata kuliah. Kemudian penelitian dan riset bagi mahasiswa yang terlibat penelitian dengan dosen, misal 3 sks saja dengan standar yang telah kita tetapkan. Kemudian proyek kemanusiaan, ini juga tidak terlalu relevan jadi tidak perlu konversi, kemudian kewirausahaan dan studi/ proyek independen. Kalau menurut saya yang perlu ada konversi itu adalah magang dan proyek di desa Kita harus buat standar yang ditetapkan di jurusan. Magang misalnya, kita tetapkan 6 bulan karena akan dikonversi ke mata kuliah minimal 20 SKS, peran apa saja yang harus dijalankan, termasuk mitra juga, misal kementerian dalam negeri Kita harus bangun dulu dengan mitra yang ada, apa yang harus fakultas sediakan, termasuk biaya transportasi untuk dosen Kalau untuk mata kuliah di desa, maka harusnya mata kuliahnya harus ditambah menjadi 8 mata kuliah
Indah	<ul style="list-style-type: none"> Mudahan ini bisa dishare ke fakultas. Kalau magang, selama ini mahasiswa kita sudah magang, kalau magang itu dijadikan wajib, maka tentu saja akan berdampak pada ekonomi mhs kita. Sy setuju untuk disiapkan mata kuliah di jurusan, baik untuk magang, program di desa maupun kewirausahaan dan lain sebagainya
Ai	<ul style="list-style-type: none"> Mata kuliah ini tidak mungkin 1 mata kuliah
Indah	<ul style="list-style-type: none"> Kenapa
Ai	<ul style="list-style-type: none"> Karena mahasiswa ini akan meninggalkan kampus dan berdiam diri di desa selama satu semester, maka kita harus siapkan mata kuliah untuk itu
Indah	<ul style="list-style-type: none"> Program membangun desa memang menjadi program universitas, maka tidak terpikir bahwa mereka akan stay di desa selama 6 bulan. Sy dengan sekjur akan membuat paket mata kuliah untuk program desa sebanyak 24 SKS. RPS nya harus dibuat dengan standar yang sama dengan capaian yang berbeda. Kita tentukan saja sekarang
Al	<ul style="list-style-type: none"> Kita dudukan dulu secara teliti, tidak langsung-langsung saja, ini mana yang ingat saja. Kapan kita akan laksanakan? Ini penting kita sepakati juga, karean pergerseran itu ada implikasi bagi mahasiswa, harus ada kajian serius ini
Indah	<ul style="list-style-type: none"> Anak angkatan 2018 sudah bisa mengambil program merdeka belajar
Al	<ul style="list-style-type: none"> Tidak mungkin angkatan 2018, karean mereak masih mengambil mata kuliah sudah jalan. Yang memungkinkan adalah angkatan 2020 yang akan diterapkan di 2021
Rika	<ul style="list-style-type: none"> Kapan diterapkan oleh WD 1?
Indah	<ul style="list-style-type: none"> Desember 2020. Jadi kita sepakati akan diterapkan pada mahasiswa angkatan 2020 Setelah kita masukan kewarganegaran kedalam mata kuliah semester 4, maka akan kita kirimkan surat pengantar ke fakultas agar dibuatkan surat

	ke rektor untuk pengesahana kurikulum jurusan
Ai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa harus sudah punya perencanaan untuk itu, termasuk dosen PA, kita siapkan rancangannya, sehingga kita sama satu tujuan untuk melakukan itu
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sy minta untuk dosen-dosen menjadi tim adhoc membahas kurikulum merdeka belajar, ketuanya Pak Ai, dengan anggota nya semua dosen jurusan ▪ Sekarang kita masuk pada penawaran mata kuliah semester genap
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kurikulum lama, berapa orang mahasiswa yang mengulang buk sejour
Dewi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya 1 orang, yaitu Sektia Subakti, yaitu mata kuliah Pengantar Antropologi dan Komunikasi Politik
Indah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kita langsung saja masuk pada kurikulum baru ▪ Oke, penwaran mata kuliah sudah selesai kita lakukan, masing-masing dosen mendapatkan SKS mata kuliah wajib 6-9 SKS ▪ Untuk CPL kita share di WAG Info Akademik saja ▪ Demikian saja, rapat kita cukupkan sampai disini. Terimakasih

Keputusan Rapat ;

1. Mata kuliah Teori Perbandingan Politik (W) diganti dengan mata Kuliah Kewarganegaraan (W) pada semester IV
2. Dokumen kurikulum secepatnya akan dikirimkan ke fakultas untuk dibuat surat pengantar pengesahan kurikulum ke rektor
3. Kurikulum mata kuliah merdeka belajar akan diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2020 berlaku untuk semester ganjil 2021/2022
4. Untuk pembuatan draf kurikulum merdeka belajar dibentuk tim adhoc, dengan ketua Pak Aidil Zetra dengan anggota semua dosen JIP
5. Rapat jurusan untuk membahas draf kurikulum merdeka belajar akan dilakukan pada Hari Jumat/13 November 2020 jam 14.00 WIB

Notulen,

Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si